BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Langkah-Langkah AIBEP Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaan AIBEP di Kalimantan Selatan dibutuhkan suatu kerangka kerja agar program tersebut dapat diaplikasikan secara maksimal. AIBEP telah direncanakan empat pilar pengembangan. Pilar tersebut merupakan suatu strategi yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Pembangunan ini mencakup peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyediaan layanan pendidikan dasar, Pembangunan Sekolah Terintegrasi, yang memasukkan penguatan kapasitas sekolah dan proses belajar-mengajar (baktinews vol 3,2008:12)

4.1.1 Pilar 1 (Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan)

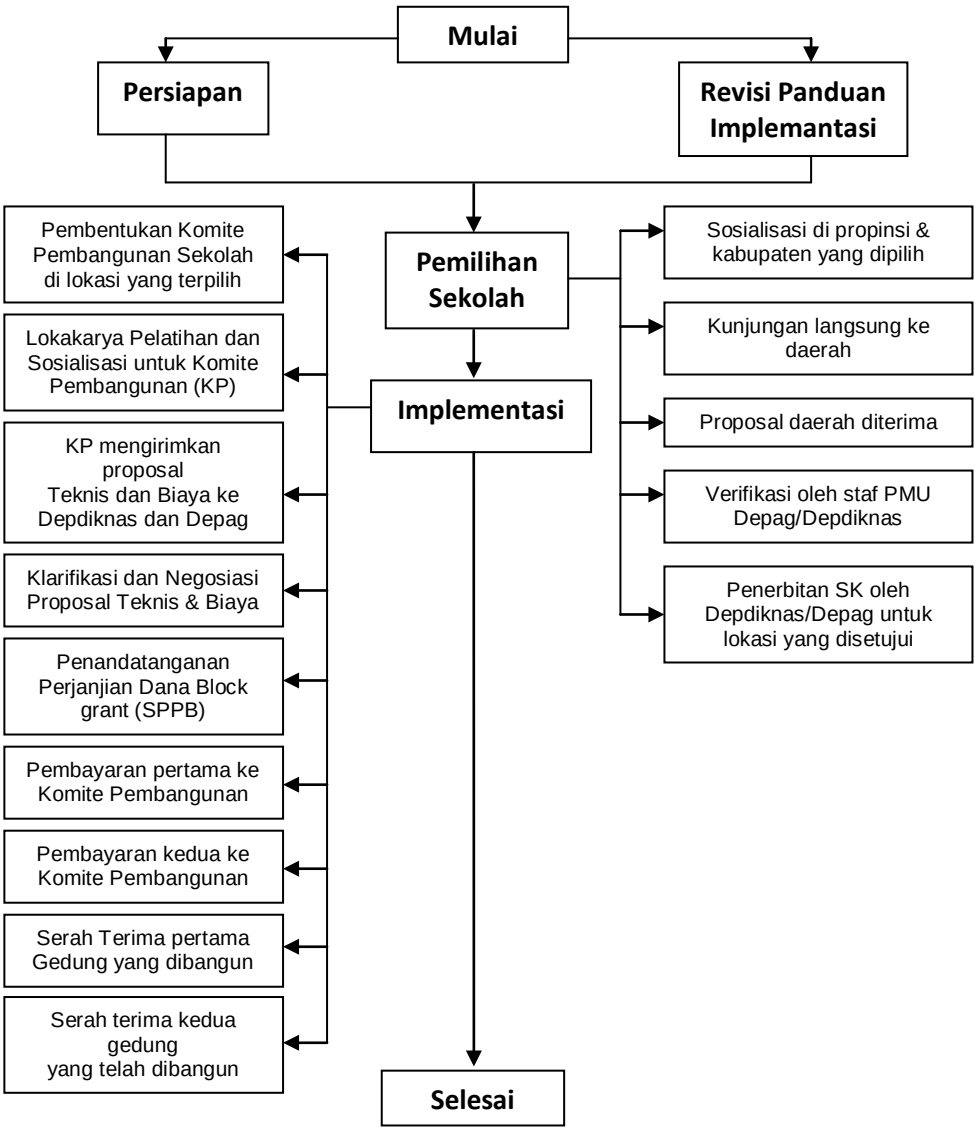
Pilar pertama ini merupakan pilar peningkatan pemerataan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang harus direalisasikan di Kalimantan Selatan. Peningkatan pemerataan akses ini dilakukan melalui pembangunan fasilitas sekolah dasar.

4.1.1.1 Sekolah Dasar Satu Atap (SATAP)

Sesuai dengan kebutuhan pendidikan sekolah dasar, maka Kalimantan Selatan akan mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan ruang/gedung. Pembangunan sekolah tersebut yaitu pelaksanaan pembangunan sekolah dasar

satu atap (SATAP) yang dilaksanakan oleh Depdiknas dan pengembangan sekolah dasar oleh Depdiknas/*Ministry of National Education* (MONE) dan pembangunan oleh Depag/*Ministry of Religious Affairs* (MORA).

Skema 4.1
Proses Umum Implementasi Program Pembangunan AIBEP



Sumber : Panduan Manual *Australia Indonesia Basic Education program* Edisi Kedua, 2008: 78

Hasil yang telah dilaksanakan oleh AIBEP pada fase pertama tahun 2006 hingga tahun 2008. Seluruh bangunan sekolah memenuhi standar pemerintah

Indonesia. Kontraktor pembangunan sekolah yang ditunjuk oleh MCPM di Kalimantan Selatan Adalah PT. Miskat Alam Konsultan dan PT. Pramathana Konsultan. PT. Pramathana Konsultan mulai melakukan pembangunan unit sekolah USB pada tahun 2006 hingga tahun 2008 dan PT. Pramathana Konsultan melaksanakan pembangunan SATAP pada tahun 2007 hingga tahun 2008.

4.1.2 Pilar 2 (Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan)

Pilar kedua merupakan pilar dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan efisiensi internal sekolah. Peningkatan ini dilakukan melalui perbaikan standar dan sistim pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan pengajaran dan siswa.

4.1.2.1 Peningkatan Manajemen Aset Sekolah.

Proses peningkatan manajeman sekolah dibutuhkan dalam proses pelaksanaan oleh komite sekolah yang berperan langsung pada sistem sekolah yang dijalankan ditiap kabupaten pengembangan infrastruktur AIBEP. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh AIBEP di Kalimantan Selatan memiliki rencana manajemen aset dan pemeliharan dan rencana keuangan dalam proses implementasi pembangunannya. Hal ini merupakan salah satu pekerjaan awal dari badan pengelola AIP yang diwakili oleh MCPM dengan pengembangan sistem untuk memperluas jangkauan sistim pengelolaan sekolah yang sedang berjalan dan bukan mengganti sistim pengelolaannya. Bantuan yang diberikan MCPM adalah dalam bentuk *workshop* yang diberikan pada Komite Sekolah dan pemerintah kabupaten di Kalimantan Selatan. *Workshop* ini membahas mengenai

materi pelatihan Manajemen Aset Sekolah dan pelatihan mengenai Komponen Pemeliharaan Sekolah.

Proes pelatihan tersebut merupakan suatu kebutuhan dan diharapkan memberikan suatu manfaat yang signifikan dari pengembangan aturan dalam proses pemeliharaan sekolah setelah pelaksanaan proyek AIBEP selesai. MCPM bekerjasama dengan Depdiknas dalam mendukung dan mensosialisasikan pelatihan dan materi yang telah disampaikan dalam *Workshop*. Hal ini diperlukan dalam sistem pemetaan sekolah dan sistem pelaporan perkembangan sekolah sehingga dapat yang dioperasikan secara optimal. Peningkatan ini juga dapat menindikasi perkembangan sumberdaya tiap unit sekolah secara nasional dan memperkuat pengambilan keputusan pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten yang lebih sistematis dan terorganisir.

4.1.2.2 *Teacher Quality Assurance* (Penjaminan Mutu Guru)

Proses peningkatan mutu guru merupakan suatu prioritas karena tenaga pendidik adalah subjek dari praktik pengajaran yang bertugas menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan buku teks tertentu dan harus memiliki sifat yang aktif, kreatif dan juga produktif dalam usaha untuk melahirkan metode pengajaran yang lebih kontekstual dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Proses peningkatan sistem penjaminan mutu pengajar dilaksanakan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah kerangka pengembangan dalam strategi penjaminan mutu guru. Didalam proses peningkatan ini MCPM bertugas untuk memberikan dukungan dengan mereview, mengklarifikasi, dan memperkuat peran organisasi yang ditugaskan untuk

melakukan monitoring dan implementasi rencana-rencana di tingkat provinsi dan kabupaten.

Proses pengembangan mutu guru ini diaplikasikan dalam bentuk ToT *Whole District Development* (WDD) dan *Whole School Development* (WSD). Tujuan ToT WDD/WSD ini adalah untuk membentuk *National Trainers* yang siap mengadakan *Training* di kabupaten/ kota Propinsi Kalimantan Selatan bagi Koordinator Provinsi (*Provincial Coordinators*) dan Koordinator Kabupaten (*District Coordinators*).

Hasil yang didapat dari proses pelatihan Materi ToT WDD/WSD ini akan dipublikasikan dalam materi yang dikirimkan pada tiap unit sekolah di Kalimantan selatan dan dimanfaatkan sebagai basis program pelatihan bagi guru yang baru diangkat, dan juga untuk peningkatan guru-guru yang telah mengajar. Proses Pelaksanaan di Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat memberikan pandangan menganai sekolah yang berkualitas sebagai suatu kebutuhan dalam penyediaan komponen-komponen formatif dasar bagi para pendidik dalam bidang studi yang berbeda-beda. Penjaminan terhadap tambahan kemajuan ilmiah yang dapat meningkatkan kualitas sekolah yang telah direncanakan pada awal pembentukan proyek pengembangan AIBEP.

4.1.2.3 *Whole School Development* (WSD) dan *Whole District Development* (WDD)

Whole School Development (WSD) dan *Whole District Development* (WDD) ini merupakan suatu strategi atau siatem yang dikembangkan untuk mencapai target SPN dalam aplikasi dalam proses peningkatan kualitas tiap unit

sekolah yang masih kurang memadai pada proses review infastuktur sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kalimantan Selatan. Hasil yang diharapkan adalah WSD dan WDD ini dapat dijalankan sesuai sistem standar nasional mutu. Proses dilaksanakan WSD dan WDD ini dengan diadakan pelatihan ToT telah dilakukan untuk pelatih di tingkat kabupaten untuk meningkatkan kepemimpinan dalam kependidikan dan manajemen sekolah. Penyediaan koordinator dan pelatih di tingkat daerah ini merupakan satu bentuk bantuan yang berkelanjutan bagi sekolah dalam mengembangkan kapasitas agar dapat beroperasi sesuai Standar Nasional dalam lingkungan peningkatan mutu yang berkelanjutan pasca proses implementasi pembangunan sekolah AIBEP. Pengawas Sekolah dan perwakilan sekolah berpartisipasi dalam kegiatan *workshop* WSD dan WDD dalam TOT ini dirancang untuk menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan mutu di sekolah. Program WSD dan WDD juga merupakan dukungan untuk mencapai Renstra Depdiknas dalam mengembangkan kapasitas insitusional, mengembangkan perencanan dan manajemen pendidikan, meningkatnya partisipasi masyarakat dan mutu pendidikan dasar melalui pengembangan kurikulum dan bertambahnya kapasitas profesional pendidik.

Pelaksanaan *workshop* ToT untuk Koordinator Provinsi Kalimantan Selatan ini memberikan kapasitas untuk melaksanakan *workshop* di sekolah hingga pihak Komite Sekolah dan pengelola sekolah dapat membangun kapasitas dalam hal manajemen berbasis sekolah, pengajaran dan pembelajaran, serta partisipasi masyarakat. Pelaksanaan *workshop* ToT untuk para personil Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK),

Balai Diklat, dan pusat akan membantu terbentuknya semacam kelompok ahli di Kalimantan Selatan dan memberi kemampuan untuk memperluas kegiatan pelatihannya di luar sekolah-sekolah yang dibangun AIBEP di tingkat kabupaten.

Peningkatan melalui pelatihan Kepala sekolah, komite sekolah dan anggota masyarakat untuk kepemimpinan dan manajemen sekolah dengan proses pelaksanaan *Workshop* ToT I dan ToT II di tingkat daerah, memberi kepala sekolah, komite sekolah, dan anggota masyarakat pelatihan perencanaan sekolah, implementasi pengajaran dan pembelajaran kontekstual, pengembangan kurikulum berbasis sekolah, BSNP, dan kebijakan di tingkat sekolah. Proses implemantasi ini bekerjasama *National Trainer* untuk lebih jauh membangun kapasitas mereka dalam menyampaikan materi.

Kegiatan *workshop* tersebut telah mendukung sekolah hingga mereka bisa membuat perencanaan yang baik, termasuk juga bagi semua para pemangku kepentingan dalam prosesnya, dengan cara yang transparan dan akuntabel. Para pemangku kepentingan akan memiliki pemahaman mengenai peran mereka dalam mengembangkan kurikulum berbasis sekolah dan akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka akan praktek pengajaran dan pembelajaran yang baik.

Peningkatan melalui pelatihan Pengawas Kabupaten dalam pengembangan staf sekolah dan manajemen kecamatan untuk menjadi bagian dari tim perbaikan sekolah. Pelaksanaan *workshop* WSD dan WDD di tingkat daerah adalah dengan memberi pengawas sekolah, komite sekolah, dan anggota masyarakat dengan pelatihan perencanaan sekolah, implementasi pengajaran dan pembelajaran

kontekstual, pengembangan kurikulum berbasis sekolah, pengetahuan mengenai SNP dan kebijakan di tingkat sekolah. Pengawas sekolah berpartisipasi sebagai anggota Tim Pengembangan Sekolah. Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan di *workshop* daerah. Melanjutkan diskusi dengan perwakilan Depdiknas dan Depag di tingkat pusat guna menjamin kesinambungan kegiatan dan memfinalisasi modul untuk disampaikan di sekolah.

Workshop ini membantu sekolah dalam melakukan perencanaan dengan benar, termasuk semua para pemangku kepentingan dalam prosesnya, dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pengawas sekolah akan memiliki pemahaman mengenai peran mereka dalam membuat Rencana Pengembangan Sekolah, kurikulum berbasis sekolah, dan akan berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pengajaran dan pembelajaran yang baik. Keikutsertaan para pengawas sekolah dan sekolahnya dalam kegiatan ini membuka kesempatan bagi kemitraan yang kuat yang akan dikembangkan antara sekolah dan pengawas. *Workshop* ToT ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih baik antar badan pemerintah di tingkat kabupaten dan mendukung pengembangan jaringan di seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan.

4.1.2.4 *School Quality Assurance* (Penjaminan Mutu Sekolah)

Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang terintegrasi secara nasional ini diharapkan dapat memberikan suatu proses nyata penjaminan kualitas sekolah dan komite sekolah yang menjalankan implementasi kebijakannya. Pelaksanaan penjaminan muru sekolah telah dirancang untuk penjaminan mutu sekolah dan guru. Proses implementasi pengembangan lebih jauh terhadap Model Penjaminan

Mutu Pendidikan Indonesia dan pengembangan strategi untuk mengimplementasikan dan memperkenalkan *Educational Quality Assurance Model* (EQAM) dalam aplikasi langsung untuk peningkatan mutu guru dan sekolah Kalimantan Selatan. EQAM merupakan suatu kunci yang diharapkan dapat menjamin program reformasi sektor pendidikan nasional.

4.1.2.5 Materi Belajar Mengajar

Dalam proses pemberian materi belajar mengajar yang diberikan oleh AIBEP di Kalimantan Selatan diimplementasi langsung oleh Pusat Buku (PusBuk) Depdiknas untuk mengkaji pengoperasian dan standar dalam menjalankan tanggung jawab mengevaluasi buku teks dan mengembangkan sejumlah tujan dan kegiatan dalam menjamin meningkatnya akses bagi semua siswa terhadap bahan pelajaran dan buku teks yang lebih baik termasuk juga *upgrade* dan modifikasi yang mungkin diperlukan untuk sistem informasi komputer dan data.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas dalam memastikan bahwa Pusbuk dapat memenuhi standar buku teks untuk digunakan secara resmi di sekolah. Proses pembagian buku panduan materi bahan ajar tersebut memberikan dukungan dengan meningkatkan penyediaan informasi bagi sekolah pada saat mereka menyeleksi buku-buku yang disetujui BSNP. Dalam peningkatan mutu buku teks pihak pengelola program dari pihak Pemerintah Australia hanya terbatas pada peningkatan kontrol dan pengawasan yang dapat diaplikasikan Pusbuk kepada para penerbit swasta.

4.1.2.6 *Curriculum Development* (Pengembangan Kurikulum)

Pengembangan kurikulum adalah proses peningkatan akhlah mulia, penigkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Kurikulum juga dilihat dari keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan kurikulum yang dikembangkan dalam AIBEP direalisasikan pada peningkatan kapasitas tim teknis Depag yang mendukung implementasi standar kurikulum nasional, pengembangan kurikulum berbasis sekolah, dan kurikulum agar bisa memenuhi standar-standar nasional BSNP. Kegiatan-kegiatan ini berfokus pada penyediaan dukungan dan bantuan bagi uji coba desain pelatihan ToT yang mengaplikasikan pengembangan kurikulum sekolah untuk pelatih guru dan pelatih pengawas, dan model pelatihan berbasis sekolah.

Dampak dari penggunaan jasa praktisi yang telah melalui proses pelatihan oleh AIBEP ini sebagai *trainer* dengan penggunaan materi pembelajaran dalam model rancangan pelatihan. Proses ini diharpkan dapat menghasilkan pengajaran kelas yang lebih menarik dan lebih inovatif. Dampak positf lainnya adalah meningkatnya kemampuan anggota komite kurikulum sekolah dalam melakukan diagnosa mandiri atas pencapaian pengembangan kurikulum berbasis sekolah dan peningkatan rasa percaya diri penyelenggara sekolah termasuk para pendidik dalam menjalankan dan mengelola pelatihan berbasis sekolah. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan akan pelatihan peningkatan kapasitas. Pelaksanaan pelatihan ini akan menggantikan pendekatan pengembangan kapasitas yang bersifat *top-down*. Implementasi pendekatan pelatihan yang

bersifat tatap muka ini memiliki sisi negatif seperti menghabiskan waktu kerja yang lama dan membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Pelajaran yang didapat juga menunjukkan bahwa tidaklah realistis untuk mengembangkan silabus selain dari silabus lima mata pelajaran.

4.1.2.7 Penetapan Standar Pendidikan dan Pengawasan

Dalam penetapan standar pendidikan dan pengawasan akan sekolah yang dikembangkan oleh AIBEP ini BSNP membentuk organisasi pengembangan dan pengawasan Standar Nasional Pendidikan. Kajian organisasi dan kapasitas BSNP dan rekomendasi untuk struktur dan pengoperasiannya (*BSNP Organisation and Capacity Review*) termasuk pembangunan Sekretariat BSNP dan *Standing Committee*. Implementasi rekomendasi dalam pembentukan badan yang dibentuk oleh BSNP ini akan berdampak langsung pada efisiensi dan kesuksesan BSNP dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Salah satu kendala utama dalam penyediaan dukungan bagi BSNP ini adalah dalam pengadaan spesialis peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan di luar negeri, bagi anggota komite yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi.

Analisis dari standar BSNP, yaitu Isi Pembelajaran dan Kompetensi Lulusan yang diadakan di provinsi Kalimantan Selatan, juga dukungan dalam mengkaji dan meningkatkan instrumen monitoring yang digunakan untuk implementasi standar BSNP tersebut. MCPM bekerjasama dengan BSNP dalam mengkaji ulang Kualifikasi Standar Akademis Guru dan Standar Kompetensi, termasuk pengembangan uji kompetensi guru. Pengembangan Kerangka Kerja Monitoring juga dilanjutkan dengan persiapan untuk memonitor tiga standar yaitu

melihat Isi Kurikulum, Kompetensi Lulusan, dan Sumber Daya Manusia (Guru, Kepala Sekolah, Pengawas sekolah).

4.1.2.8 Ujian Nasional dan Penilaian Berbasis Kelas

Ujian nasional yang merupakan titik penentu dalam proses pendidikan di Indonesia. Hasil pembelajaran diukur dari hasil ujian nasional yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan tiap tenaga pendidik. Dalam proses peningkatan ujian nasional dan penilaian berbasis kelas (*classroom-based assessment*) ini pemerintah Indonesia yang diwaliki oleh Pusat Penilaian Kependidikan (Puspendik) dan BSNP bekerjasama dengan pemerintah Australia yang diwakili oleh yaitu *Centre for Educational Assessment* (CEA).

Puspendik selama tahap pembangunan pada periode 2008 telah membangun dan memperkuat hubungan antara Puspendik dan BSNP dalam mengklarifikasi tanggung jawab mereka dalam menyiapkan, melakukan, dan melaporkan ujian nasional. Dukungan juga diberikan pada proposal pembentukan Badan Ujian Nasional, termasuk sosialisasi rencana sebelumnya untuk mengembangkan Badan Ujan Nasional, termasuk mensosialisasikan rencana pengembangan. Peningkatan kapasitas kerjasama ini memungkinkan staf CEA mengembangkan materi dan metode penilaian yang lebih baik untuk ujian nasional. Kerjasama yang dilakukan ini berbentuk *workshop* yang dilakukan oleh *trainer* internasional untuk pelatihan ToT dalam Penulisan Soal dalam Bahasa Inggris, IPS, Matematika, dan IPA, untuk Ujian Nasional. Dalam workshop ini sejumlah rencana diformalisasikan dan disetujui untuk terus didukung MCPM dalam hal penentuan standar dan tolak ulur ujian. Diskusi diadakan dengan ACER

dan Pusat Penilaian untuk *workshop* peningkatan kapasitas lebih lanjut dalam hal pelatihan analisis dan pelaporan tahunan mengenai ujian nasional SATAP di Kalimantan Selatan.

4.1.3 Pilar 3 (Pengembangan Kapasitas untuk Tata Kelola Layanan Pendidikan)

Pilar ketiga ini merupakan pilar peningkatan tata kelola layanan pendidikan dasar melalui penguatan proses perencaan dan pengelolaan keuangan, serta sistem pengawasan kinerja sektor. Tujuan dari pilar ketiga ini adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan peningkatan dengan menetapkan kebijakan strategis serta program yang didasarkan pada urutan prioritas.

4.1.3.1 Rencana Strategi (RENSTRA)

Dalam AIBEP harus memiliki tingkat pengawasan dalam pross penyaluran dana pinjaman dan hibah. AIBEP juga merupakan usaha untuk menjalankan Renstra (Depdiknas) yang merupakan suatu kerangka pengembangan yang merupakan prioritas dan tingkatan standar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Renstra juga digunakan sebagai basis untuk perencanaan tahunan dan penilaian kinerja sektoral. Proses implementasi dari Renstra ini menghasilkan penyelesaian empat tingkatan Renstra (Nasional, Departemen, Unit Utama, Propinsi). Hal ini merupakan upaya penilaian atas pemahaman di tingkat provinsi dan kabupaten di Kalimantan Selatan mengenai Renstra Pendidikan Nasional dan

juga untuk mengetahui berbagai kendala dalam pengimplementasian Renstra daerah. Penuntasan Renstra dan Rencana Operasional.

Dalam membuat perencanan tahunan, Pemerintah Indonesia belum mampu secara sepenuhnya menggunakan Renstra Nasional sebagai suatu kerangka pengembangan dikarenakan adanya kendala seperti : kendala internal mengenai kurangnya pemahaman secara keseluruhan pada anggota Depdiknas mengenai struktur dan isi Renstra Pendidikan Nasional. Secara teknis, anggota Depdiknas tersebut tidak memiliki cukup kapasitas untuk menerjemahkan target yang dituangkan dalam dokumen Renstra sebagai target *output* kegiatan yang diproses melalui AIBEP. Sebagian besar pengetahuan pemerintah daerah mengenai Renstra Nasional sangat minim. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan juga tidak menjadikan Renstra Daerah untuk pedoman pengembangan program Renstra Nasional, karena minimnya kapasitas tadi. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah meminta dukungan Depdiknas sehingga dapat memahami apa target Renstra Nasional dan dengan dukungan tersebut, pihak pengelola yang ada didalam pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan Renstra Daerah mereka, yang sesuai dengan Renstra Nasional.

Pada fase pertama pengambangan AIBEP ini melakukan suatu pemetaan mekanisme dan alat monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian kunjungan ke Kalimantan Selatan dan beberapa kabupatennya oleh Depdiknas dalam usaha sosialisasi Renstra. Proses ini dilakukan untuk mengemas ulang (*repackage*) alat dan mekanisme peningkatan kualitas sehingga didapatkan

alat dan mekanisme yang paling efektif sedang dilakukan dalam proses pengawasan dalam aplikasi langsung peningkatan kapasits tiap unit sekolah.

4.1.4 Pilar 4 (Jaminan Mobilisasi Sumberdaya dalam Sektor Pendidikan)

Pilar keempat ini merupakan pilar dalam jaminan mobilisasi sumberdaya dalam sektor pendidikan. Pilar ini memfokuskan pada pengawasan tingkat volume, tingkat efektivitas dan kesetaraan sumberdaya, mobilisasi dan alokasi di sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.

Dalam ketentuan berjalannya kebijakan dalam menjamin mobilisasi sumberdaya pada sektor pendidikan untuk memastikan koherensi antara ketiga pilar pengembangan program AIBEP lainnya. proses pengawasan dalam konstruksi di sembilan daerah di kalimantan selatan ini dilakukan melalui proses pengawasan menyeluruh dari proses penyaluran dana dan implementasi oleh kontraktor yang bertugas untuk membangun sekolah SATAP di Kalimantan Selatan.

Dikutip dari *Australia Indonesia Partnership (Trust Account Manual Milestone No. 1)* yang menjelaskan bahwa didalam pilar keempat ini, badan pengelola atau pelaksana program telah melakukan pengendalian arus dana yang diberikan kepada sembilan wilayah di Kalimantan Selatan.

Pendekatan khusus dalam pembentukan Rencana Pengendalian Kecurangan Perusahaan Cardno Acil sebagai kontraktor MCPM yang berasal dari pihak Australia. Rencana Pengendalian Kecurangan Perusahaan Cardno Acil dikembangkan bersama AusAID dan mencakup Bagian B, Klausul 36 KON 37597 dan Petunjuk Pengendalian Kecurangan Pemerintah Australia tahun 2002.

Semua prosedur penyidikan telah dilaksanakan, dan akan akan sesuai dengan Standard Penyelidikan Pemerintah Australia. Kegiatan penyimpangan atau kecurangan didefinisikan sebagai secara tidak jujur mencari keuntungan dengan menipu atau cara lainnya, (semua bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme). Proses pencegahan dan deteksi penyimpangan yang ada dalam Rencana Pengendalian Kecurangan mencakup:

- Identifikasi dan analisa resiko.
- Penciptaan kesadaran akan tindakan dan akibat dilakukannya kegiatan penyimpangan oleh staf MCPM atau organisasi pihak ketiga.
- Sistem operasional yang transparan dan dapat diaudit untuk mempermudah deteksi.
- Proses pelaporan dugaan kecurangan saat terjadi termasuk pemberitahuan kepada AusAID dalam 5 hari kerja.
- Sistem respon investigatif/reaktif terhadap dugaan penyimpangan.
- Langkah penyelesaian masalah penyimpangan pada proses implementasi yang tepat. (*Australia Indonesia Partnership, Trust Account Manual Milestone No. 1*, 2006: 18-19)

Fokus utama pada pengawasan tingkat volume, tingkat efektivitas dan kesetaraan sumberdaya, mobilisasi dan alokasi di sektor pendidikan di Kalimantan Selatan telah menunjukan hasil yang baik dengan melihat implementasi pembangunan unit-unit sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dijadikan indikator keberhasilan proses pengawasan

pengaliran dana di daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Keberhasilan dalam implementasi tersebut dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan sekolah pada fase kedua yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 hingga 2010. Hal-hal mengenai proses pelaksanaan, kendala, dan keberhasilan merupakan indikator penting dalam proses program AIBEP fase kedua.

4.2 Implementasi AIBEP dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan

4.2.1 Peningkatan Infrastruktur Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan

Fokus peningkatan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan kebijakan yang diaplikasikan dalam strategi peningkatan kualitas untuk mendukung perluasan akses pendidikan dasar dalam AIBEP. Penyediaan sarana/prasarana sekolah dasar ini mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Kegiatan ini diarahkan untuk membangunan infrastruktur sekolah dasar SATAP yang meliputi ruang kelas baru, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan Nasional di kalimantan Selatan.

Dalam melihat proses pengembangan AIBEP yang dilaksanakan pada fase pertama ini, peneliti menjelaskan pada peningkatan tingkat kelas, siswa dan tenaga pengajar. Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai perkembangan selama proses pengembangan yang dikelola oleh Depdiknas/*Minintry of National Education* (MoNE) dan yang dikelola Depag/*Ministry of Religious Affairs* (MoRA) dalam AIBEP berdasarkan 9 distrik di Kalimantan Selatan.

Proses pengembangan SATAP dalam AIBEP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah sekolah dasar yang pada 2007 berjumlah 13.153 unit sekolah. Data tersebut dikutip dari jumlah kelas dari tingkat tiap provinsi yang dipublikasikan oleh Depdiknas pada periode 2006/2007.

Data dibawah ini adalah data perkembangan sekolah dasar di 9 distrik wilayah pengembangan AIBEP yang dikutip dari *Statistical Profiles of BEP Provinces and Districts (Province of Kalimantan Selatan)* yang dipublikasikan oleh AIP dengan melihat tingkat pendidikan sekolah dasar pada 9 distrik wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 4.1
Statistik Peningkatan Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan

Kota	Tahun			
	2006/2007		2007/2008	
Kab. Kota Baru	1.265	55	1.270	58
Kab. Banjar	2.052	921	2.057	924
Kab. Barito Kuala	1.546	325	1.550	328
Kab. Hulu Sungai Tengah	1.549	231	1.552	235
Kab. Kab. Hulu Sungai Utara	1.138	465	1.141	467
Kab. Tabalong	1.450	189	1.453	192
Kab. Tanah Bumbu	713	53	715	55
Kab. Balangan	1.024	325	1.026	325
Kota Banjar Baru	563	52	563	52

Sumber : *Statistical Profiles of BEP Provinces and Districts (Province of Kalimantan Selatan),*2008: 86-95

Pada proses pembangunan sekolah dasar ini juga termasuk pengadaan alat bantu sekolah yang akan membantu sekolah dalam proses belajar mengajar.

(i) pengadaan furnitur (meja, lemari, rak, jam dan mesin ketik)

(ii) pengadaan buku teks dan alat pembelajaran untuk digunakan siswa, guru dan perpustakaan sekolah;

(iii) pengadaan media pembelajaran dan alat-alat olahraga.

Proses implementasi di wilayah Kalimantan Selatan di bawah program pembangunan sekolah yang telah melalui suatu kesepakatan antara Depdiknas dan Depag. Proses umum dari implementasi program pembangunan AIBEP ini dilakukan dari *MoU Project Loan Agreement* dan *Project Grant Agreement*.

Berikut ini merupakan daftar sekolah dasar dibeberapa wilayah pengembangan di Kalimantan Selatan yang menerima bantuan pengembangan infrastruktur sekolah dasar dalam AIBEP fase pertama.

Tabel 4.2
Daftar Sekolah Dasar AIBEP Fase Pertama

Sekolah Kode BEP (BEP School Identifier Code)	Nama Sekolah (School Name)	Kecamatan (Sub District)	Kabupaten/Kota (District /City)
SATAP 0488	SDN Gunung Batu	Sambung Makmur	Banjar
SATAP 0489	SDN Karya Baru	Barambai	Barito Kuala
SATAP 0490	SDN Tamban Muara Baru	Tamban	Barito Kuala
SATAP 0491	SDN Parigi 1	Daha Selatan	Hulu Sungai Selatan
SATAP 0493	SDN Paharangan 2	Daha Utara	Hulu Sungai Selatan
SATAP 0494	SDN Pematang	Banua Lawas	Tabalong
SATAP 0495	SDN Meho	Bintang Ara	Tabalong
SATAP 0496	SDN Mangkupun 2	Muara Uya	Tabalong
SATAP 0497	SDN Pandang Panjang 2	Tanta	Tabalong
SATAP 0498	SDN 1 Kusambi	Batulicin	Tanah Bumbu
SATAP 0499	SDN Sardangan	Kusan Hilir	Tanah Bumbu

http://www.bep.or.id/index.php/weekly Report 2008_090213_090113.pdf

Pembangunan infrastruktur sekolah ini diharapkan merupakan suatu jawaban dalam membantu masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik atau kemampuan siswa melalui kemudahan dalam mendapatkan proses pendidikan. Proses

pendidikan yang sudah seharusnya bertujuan menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan intelektual sehingga mampu menciptakan manusia Indonesia yang terdidik dan berbudaya (*educated civilized human being*).

4.2.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar

Pilar kedua ini AIBEP telah memberikan kontribusi melalui perbaikan standar dan sistim pengelolaan kinerja yang berkaitan dengan sekolah, guru, bahan pengajaran dan siswa. Pilar tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pendidikan sekolah dasar agar dapat meningkatkan kualitas secara merata. Akan tetapi dari proses implementasi/ pilar kedua ini tidak dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara maksimal.

4.2.2.1 Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada poin mengenai rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan kebijakan strategis AIBEP untuk mendukung strategi pengembangan Pemerintah Indonesia. Rekrutmen pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan kualifikasi guru profesional yang memadai di tiap sekolah dasar di Kalimantan Selatan, pemerataan penyebaran secara geografis, dan keahlian dari tiap tenaga pengajar. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan pengaturan mekanisme penempatan dan redistribusi tenaga pengajar, dan sistem insentif guru di daerah.

Pengembangan guru sebagai tenaga profesioanl merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji

kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya, guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru maupun untuk guru yang sudah bekerja. Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan di setiap sekolah.

Berikut ini merupakan perbandingan jumlah guru sekolah dasar yang telah direkrut dalam AIBEP. Meskipun jumlah guru tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan siswa di Kalimantan Selatan. Keterbatasan tenaga profesional yang direkrut menjadi kurang memadai dengan kebutuhan tiap unit sekolah di Kalimantan Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerataan akses layanan pendidikan masih belum dapat direalisasikan secara maksimal.

Tabel 4.3
Statistik Peningkatan Guru Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan

Kota	**Tahun**			
	2006/2007		**2007/2008**	
Kab. Kota Baru	1.831	87	1.833	94
Kab. Banjar	3.085	1.362	3.130	3.160
Kab. Barito Kuala	1.962	511	1.994	521
Kab. Hulu Sungai Tengah	2.363	511	2.381	527
Kab. Kab. Hulu Sungai Utara	1.664	821	1.671	830
Kab. Tabalong	1.838	279	1.845	281
Kab. Tanah Bumbu	1.500	87	1.512	93
Kab. Balangan	1.599	371	1.603	375
Kota Banjar Baru	979	108	979	109

Sumber :*Statistical Profiles of BEP Provinces and Districts (Province of Kalimantan Selatan),*2008: 86-95

Dalam proses perekrutan ini, AIBEP memberikan pelatihan dan seminar yang diberikan pada komite sekolah. Program pelatihan dan seminar ini diaplikasikan pada *Training for Trainer* (TOT) yang dibagi pada 2 seri pembahasan materi peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Deskripsi Materi dalam Kegiatan ToT WDD/WSD yang diberikan oleh AIBEP kepada yang dikutip dari artikel yang berjudul *"Pendidikan Indonesia dan WDD-WSD AIBEP"* yang ditulis oleh Jamaris AM.

a. ToT Seri I

1. Gambaran Umum WDD dan WSD (*An Overview of WDD/WSD*)
2. Kerangka / Acuan Undang-Undang
    - Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
    - Pembagian Tugas Wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
    - Standar Nasional Pendidikan
    - Undang-Undang Guru dan Sertifikasi Guru
3. Rencana Strategis (Renstra)
4. Pilar-Pilar Sekolah Efektif
5. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
6. Membangun Tim Yang Handal
7. Pembelajaran CTL dan PAIKEM
8. Peran Serta Masyarakat (*The Role of Society*)

9. Kelembagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
10. Pendidikan Formal dan Nonformal
    - Pendidikan Dasar dan Menengah
    - Pendidikan Kelompok Belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SMP/MTs.
    - Kebijakan dan Program
    - Pengarusutaman Gender
    - Pendidikan Inklusif (Pendidikan Khusus bagi ABK)
11. Rencana Pembangunan Sekolah dan Madrasah
12. Keterampilan Melatih
    - *Outbound Activities*
    - *Ice-Breakers and Energizers*
    - *Public Speaking* (Teknik Berbicara di depan Publik)
    - Menyusun Materi Pelatihan

b. TOT Seri II

1. Analisis Situasi Sekolah
2. Pengembangan KTSP 2007-2008
3. Penilaian Berbasis Kelas dan Diagnostik
4. Sarana Prasarana, Guru, Pengawas, Kepala Sekolah, Pengelolaan.
5. Standar Penilaian Pendidikan
6. Pengembangan Bahan Ajar dan Media LPP 2008
7. Perencanaan Pelatihan KTSP

8. Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
9. Strategi Peningkatan Nilai Ujian Nasional (UN)
10. Standar Proses Permen No.41 tahun 2007
11. Supervisi Klinis
12. Rencana Tindak Lanjut (RTL) (Pendidikan Indonesia dan WDD-WSD AIBEP, 2009:1)

Program peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk memperkenalkan pengembangan kurikulum berbasis sekolah di Kalimantan Selatan ini memiliki tim inti yang terdiri atas 9 pelatih pengawas dan 29 pelatih guru, bersama dengan 15 pelatih kepala sekolah. Hasil dari pelatihan ini adalah, setiap unit sekolah yang dibangun AIBEP di Kalimantan Selatan dapat menghasilkan silabus lima mata pelajaran untuk mengimplementasikan kurikulum standar nasional.

Workshop ini membantu sekolah dalam melakukan perencanaan dengan benar, termasuk semua para pemangku kepentingan dalam prosesnya, dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pengawas sekolah akan memiliki pemahaman mengenai peran mereka dalam membuat Rencana Pengembangan Sekolah, kurikulum berbasis sekolah, dan akan berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pengajaran dan pembelajaran yang baik. Keikutsertaan para pengawas sekolah dan sekolahnya dalam kegiatan ini membuka kesempatan bagi kemitraan yang kuat yang akan dikembangkan antara sekolah dan pengawas. *Workshop* ToT ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih baik antar badan pemerintah di tingkat kabupaten dan mendukung pengembangan jaringan di seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan.

4.2.2.2 *School Quality Assurance* (Penjaminan Mutu Sekolah)

Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan suatu proses nyata penjaminan kualitas sekolah dan komite sekolah di Kalimantan Selatan yang menjalankan implementasi kebijakannya. Pelaksanaan penjaminan mutu sekolah telah dirancang untuk penjaminan mutu sekolah dan guru. Proses implementasi di 9 distrik pembangan AIBEP ini merupakan pengembangan dari Model Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia dan pengembangan strategi untuk mengimplementasikan dan memperkenalkan *Educational Quality Assurance Model* (EQAM) dalam aplikasi langsung untuk peningkatan mutu guru dan sekolah Kalimantan Selatan. EQAM merupakan suatu kunci yang diharapkan dapat menjamin program reformasi sektor pendidikan nasional.

Masalah utama yang muncul adalah bahwa penjaminan mutu berkaitan dengan layanan pendidikan yang menyeluruh di setiap distrik pengembangan, serta lembaga semi otonom dan lembaga otonom daerah Kalimantan Selatan yang kurang dapat kooperatif dalam proses implementasinya. Implemantasi EQAM kurang dapat berjalan secara maksimal karena banyaknya sub-sub dari sekolah yang harus diberikan proses pendidikan atau pelatihan terutama jika kepentingan penyaluran informasi tersebut kurang sistematis dan jika banyak pihak yang dilibatkan dalam implementasi model, pendekatan dan pembiayaannya tidak di implementasikan secara akurat kepada pemerintah daerah.

Strategi implementasi untuk EQAM telah disosialisasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam AIBEP. Proses ini dimulai dari mengembangkan berbagai bagian

dari kebijakan EQAM, khususnya pekerjaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai pusat penjaminan mutu provinsi.model yang dikembangkan adalah model Evaluasi Mandiri Sekolah di mana sekolah akan mengevaluasi diri mereka sendiri dalam aspek delapan standar mutu nasional BSNP. Hal ini dirancang untuk membantu sekolah dasar dalam membuat rencana pengembangan sekolah sebagai jalan untuk mencapai standar nasional dan juga agar memungkinkan untuk melaporkan kembali melalui para pengawas sekolah mengenai kemajuan-kemajuan mereka dalam upaya memenuhi standar nasional pendidikan.

4.2.2.3 Materi Belajar Mengajar Sekolah Dasar

Dalam proses pemberian materi belajar mengajar yang diberikan oleh AIBEP di Kalimantan Selatan diimplementasi langsung oleh Pusat Buku (PusBuk) Depdiknas untuk mengkaji pengoperasian dan standar dalam menjalankan tanggung jawab mengevaluasi buku teks dan mengembangkan sejumlah tujan dan kegiatan dalam menjamin meningkatnya akses bagi semua siswa terhadap bahan pelajaran dan buku teks yang lebih baik termasuk juga *upgrade* dan modifikasi yang mungkin diperlukan untuk sistem informasi komputer dan data.

Badan dari AIBEP yaitu MCPM memberikan bantuan dengan memberikan 46 buku teks percontihan dari sekitar 200 buku teks percontohan untuk di *upload* ke internet agar bisa di *download* oleh komite sekolah di wilayah kabupaten Kalimantan Selatan. Pusbuk juga telah meminta masukan MCPM mengenai pemilihan buku teks yang akan di *upload* pada periode berikutnya.

Permasalahan yang muncul dari metode ini adalah keputusan untuk memberikan teks buku percontohan materi bahan ajar ini melalui media internet menimbulkan beberapa masalah di pihak pemerintah dan penerbit swasta. Kebijakan pemerintah ini hanya dapat sedikit meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran mengingat sekolah di kabupaten yang terpencil sepeti di kabupaten Kota Baru yang tidak memiliki akses internet dan adanya sebagian besar sekolah di Kalimantan sekolah yang tidak menganggarkan biaya untuk koneksi internet. Permasalahan ini lalu diselesaikan dengan memunculkan pengembangan strategi distribusi yang menyertakan *hard copy* dan *soft copy* dalam bentuk CD dan website. Meskipun pelaksanaannya masih belum direalisasikan secara maksimal di setiap kabupaten di Kalimantan Selatan dikarenakan masalah anggaran yang kurang memadai.

4.2.3 Pengembangan Kapasitas Untuk Tata Kelola Layanan Pendidikan Sekolah Dasar

4.2.3.1 Peningkatan Sistem Pengendalian Internal BPKP dan BPK

Peningkatan sistem pengendalian internal dengan berkoordinasi melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Dalam proses implementasinya membutuhkan sistem pengendalian internal yang harus dikembangkan untuk mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan tanggung jawab melalui proses evaluasi diri. Sistem ini tidak hanya dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan

di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota Kalimantan Selatan.

4.2.3.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Inspektorat Jenderal

Proses peningkatan kapasitas memiliki fokus utama yaitu membutuhkan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan pendidikan, dan menetapkan program pengembangan aparat pengawas. Standar kompetensi yang telah di susun dalam AIBEP ini diimplementasikan sebagai standar untuk mengukur kompetensi auditor dan sebagai desain pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal atau nonformal. Pengembangan sistem pengawasan dilakukan melalui pengembangan teknik pengawasan dan pendekatan pengawasan. Audit kinerja sebagai suatu teknik pengawasan dan kemitraan sebagai suatu pendekatan audit yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan yang lebih baik.

4.2.3.3 Penataan Regulasi Pengelolaan Pendidikan dan Penegakkan Hukum di Bidang Pendidikan

Proses dalam aplikasi penataan regulasi pengelolaan pendidikan dan penegakkan hukum di bidang pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya yang merupakan prioritas yang penting. Aplikasi pada fase pertama ini kurang memadai dan diharapkan untuk

terus disempurnakan pada bidang pendidikan sekolah dasar ditingkat para pelaksana unit pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan.

Dalam tingkat implemantasi Renstra Nasional dalam AIBEP pada fase pertama ini belum mampu secara sepenuhnya menggunakan sebagai suatu kerangka pengembangan dikarenakan adanya kendala seperti : kendala internal mengenai kurangnya pemahaman secara keseluruhan pada anggota Depdiknas mengenai struktur dan isi Renstra Pendidikan Nasional. Secara teknis, anggota Depdiknas tersebut tidak memiliki cukup kapasitas untuk menerjemahkan target yang dituangkan dalam dokumen Renstra sebagai target *output* kegiatan yang diproses melalui AIBEP. Sebagian besar pengetahuan pemerintah daerah mengenai Renstra Nasional sangat minim. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan juga tidak menjadikan Renstra Daerah untuk pedoman pengembangan program Renstra Nasional, karena minimnya kapasitas tadi. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah meminta dukungan Depdiknas sehingga dapat memahami apa target Renstra Nasional dan dengan dukungan tersebut, pihak pengelola yang ada didalam pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan Renstra Daerah mereka, yang sesuai dengan Renstra Nasional.

4.3 Prospek Pendidikan Sekolah Dasar di Kalimantan Selatan Pasca Implementasi AIBEP Fase Pertama

Dalam melihat prospek pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan pasca implementasi AIBEP pada fase pertama ini kita dapat menggunakan teori kualitas sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kalimantan Selatan. Seperti dalam buku berjudul "*Sistem Pendidikan*

Nasional" yang ditulis oleh Kartini Kartono pada tahun 1997 mengenai teori kualitas pendidikan di Indonesia.

Buku tersebut menjelaskan bahwa dalam mengemukakan kualitas dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pendidikan berkualitas apabila :

a. Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.
b. Pelanggan eksternal :
    1. Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab akan hidupnya.
    2. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan.

Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. (Kartono, 1997 : 11).

Dengan kebijakan perluasan dan peningkatan akses pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan membuka kesempatan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disediakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang belajar, pemberian subsidi, bantuan-bantuan fasilitas dan dana pendidikan.

Analisa mengenai Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah. Jika dilihat dari indikator tersebut AIBEP belum memberikan kontibusi bagi kesejahteraan kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah yang tidak mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan diadakannya AIBEP. Penambahan yang ada hanya difokuskan pada jumlah guru yang bertambah dalam unit sekolah yang dikembangkan. Penambahan jumlah kelas yang diharapkan menjadi suatu proses dalam menangani masalah kekurangan tenaga pendidik di Kalimantan Selatan. Pendapatan tiap sekolah di Kalimantan Selatan difokuskan pada tugas pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Hal ini harus lebih diperhatikan karena kesejahteraan

masyarakat pendidikan akan lebih terjamin jika pendapatan tenaga pendidik seperti kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah lebih terjamin.

Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya. Dengan adanya seminar dan pelatihan yang diberikan kepada tiap unit sekolah AIBEP. Setidaknya telah memberikan perubahan karena tiap unit sekolah diberikan pemahaman yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dengan diadakan pelatihan ToT I dan ToT II. Pelatihan mengenai standar pendidikan nasional, kurikulum sekolah, dan juga bantuan berbentuk buku panduan dalam pendidikan yang bekerjasama dengan Depdiknas merupakan langkah nyata AIBEP untuk memberikan pembelajaran dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan sekolah di 9 distrik wilayah Kalimantan Selatan.

Dilihat dari pelanggan eksternal yaitu Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Kalimantan Selatan diarahkan untuk mencapai perubahan prilaku *(change behaviour)* berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Peserta didik atau murid sekolah dasar yaitu merupakan indikator eksternal primer yang merupakan gambaran mengenai kondisi siswa atau peserta didik di Kalimantan Selatan. Dari data tahun 2007 yaitu jumlah siswa sekolah dasar yang berjumlah sekitar 95,88 % dan telah bertambah pada tahun 2008 menjadi sekitar 97,55 % setelah direalisasikan AIBEP di 9 distrik pengembangan AIBEP. Hal ini mengindikasikan bahwa AIBEP telah berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyakat di Kalimantan Selatan meskipun

jika melihat kebutuhan masyakat yang masih tinggi dan belum meratanya akses pendidikan di wilayah yang terpencil karena tidak disetujui oleh pihak AIBEP. Sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan tidak terrealisasi secara maksimal.

Eksternal sekunder yang merupakan gambaran pelanggan pendidikan yaitu orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan. Dari indikator tersebut masih belum dapat dilihat secara nyata dikarenakan pada pendidikan sekolah dasar yang merupakan pendidikan awal tidak dapat dilihat prospek lulusan yang berkualitas dari tiap peserta didik sekolah dasar. Prospek dalam implementasi AIBEP pasca pengembangan pada tahun 2009 belum memperlihatkan hasil yang memuaskan karena pengambangan di 9 distrik baru dapat dilihat pada masa yang akan datang dengan melihat lulusan yang telah lulus pendidikan formal sehingga dapat dilihat proses peningkatan kualitas dari para lulusan yang telah bekerja. AIBEP hanya difokuskan pada pendidikan sekolah dasar yang masih belum dapat mengindikasikan keberhasilan peningkatan kualitas pada indikator eksternal sekunder.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan AIBEP untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik dan potensi daerah Kalimantan Selatan, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional telah pula dilaksanakan. Penambahan Infrastruktur seperti bangunan sekolah untuk proses belajar mengajar telah memperlihatkan pengambangan yang ditergetkan meskipun belum mengakomodasi kebutuhan di wilayah Kalimantan Selatan, pelaksanaannya masih belum optimal dan secara

umum baru digunakan oleh para perserta didik dan para tenaga pendidik di Kalimantan Selatan.

Pengelolaan pengembangan yang diberikan oleh AIBEP di 9 kabupaten dan kota seperti kab. Kota Baru, kab. Banjar, kab. Barito Kuala, kab. Hulu Sungai Tengah, kab. Hulu Sungai Utara, kab. Tabalog, kab. Tanah Bumbu, kab. Balangan dan kota Banjar Baru belum dapat memadai seluruh akses pendidikan sekolah dasar secara menyeluruh karena masih banyak unit sekolah yang belum dapat beroperasi secara optimal. Reposisi kurikulum pendidikan sekolah dasar terus dilakukan untuk lebih menjamin kesesuaian atau relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga terus dilaksanakan di bidang pendidikan sekolah dasar untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi pembiayaan sebagai bagian dari penerapan *good governance* bidang. Oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu diperluas cakupannya sehingga masyarakat dapat pula mengawasi pembangunan pendidikan baik dalam proses alokasi, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Hal tersebut perlu diperkuat dengan tersusunnya berbagai kerangka peraturan (*regulatory framework*) pada fase kedua yang mengatur secara jelas dan terukur penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Selatan.

Upaya memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan dilaksanakan melalui penerapan pendidikan kecakapan hidup (*life skill education*) yang

ditujukan untuk memfungsikan pendidikan dalam mengembangkan potensi manusiawi peserta didik melaksanakan peranannya di masa datang. Kecakapan yang dikembangkan meliputi antara lain mengenal diri, yang juga sering disebut kemampuan personal, berfikir rasional, akademik, dan vokasional serta sosial warga masyarakat Kalimantan Selatan. Melalui peningkatan pendidikan melalui 4 pilar yang dikembangkan oleh AIBEP tersebut peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara dan warga masyarakat yang membangun, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, dan memiliki kecakapan komunikasi dan empati sebagai dasar dalam menumbuhkan hubungan yang harmonis dalam lingkungannya.

Pelaksanaan konsep pendidikan kecakapan hidup perlu terus ditingkatkan agar peserta didik benar-benar memperoleh kemampuan yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan kebutuhan untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Program pendidikan dasar yang telah diaplikasikan oleh AIBEP ini bertujuan untuk:

1. memperluas jangkauan dan daya tampung sekolah dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat,
2. meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kumuh perkotaan, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang cacat secara fisik,
3. meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai,

4. peningkatan kualitas para pendidik sebagai media utama dalam proses belajar mengajar,
5. membantu proses pembelajaran yang diberikan dalam proses implementasi AIBEP di Kalimantan Selatan. Hal ini diperlukan sehingga pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan daerah dapat memberikan kebijakan dan keputusan yang tepat dalam menangani masalah pendidikan di masyarakat daerahnya, dan
6. meningkatkan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat.

Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk, upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan ditunjang pula oleh upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemampuan akademik dan profesional serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. Pendidikan lanjutan serta pendidikan dan latihan jangka pendek terus dilaksanakan baik untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepemimpinan.